# MENJADI BHINNEKA TUNGGAL IKA

BERNARDUS MARDIATMADJA, SJ

Dalam menyongsong peringatan 50 tahun Indonesia Merdeka kita ingat akan prakarsa para pendiri Republik Indonesia. Mereka sangat yakin akan perjuangannya. Mungkin sekali cara mereka berjuang berlain-lainan. Tetapi semangat mereka satu: mau meraih kemerdekaan untuk Indonesia secara menyeluruh. Pengalaman mereka ditindas Belanda dan Jepang mungkin berbeda-beda, tetapi motivasi perjuangan mereka satu. Kesatuan ini bukan hanya kesatuan emosional. Emosi mereka jelas berlainan: ada yang ingin segera merdeka, apa pun korbannya; ada yang memakai perhitungan politik; ada pula yang mempergunakan strategi militer. Jelas bahwa latar belakang perjuangan mereka berlainan dari sudut suku, agama, status sosial, maupun kategori profesi mereka. Akan tetapi, kebhinekaan itu terpadu dengan keinginan mereka bersatu memproklamasikan kemerdekaan sebagai satu negara. Perbedaan pendapat mereka kemukakan dengan jelas dan kadang kala keras. Peristiwa Rengasdengklok dapat menjadi contohnya. Semua itu tetap mengabdi satu hasrat yang sama-sama mereka yakini: Indonesia yang merdeka adalah negara mereka bersama, yang tersedia bagi mereka semua, secara sama. Mereka menghendaki *integrasi nasional di atas segala perbedaan paham.* Dalam cita-cita mereka, Indonesia merdeka haruslah memiliki sifat-sifat adil, sepakat, menyatu, manusiawi, dan takwa.

Dewasa ini ada suatu gejala yang menarik. Di satu pihak ada gelombang pemersatu melanda bangsa kita. Indonesia semakin "kecil". Hubungan antara suku-suku, daerah, dan golongan bertambah banyak dan erat. Tidak ada pelosok yang terpencil. Beraneka berita mengitari bumi dan semua orang mengetahui hal ikhwal dan nasib semua. Bangsa

kita merasa diri satu dan sudah menciptakan lembaga-lembaga yang merangkum semua, organisasi antarpropinsi dan nasional dengan puncaknya DPR/MPR, yang betapapun rapuhnya merupakan suatu persatuan di antara kita. Tetapi di pihak lain ketegangan dan pertentangan menjadi-jadi saja; perselisihan antara suku-suku dan golongan tidak mereda. Ada ketegangan antara apa yang dinamakan "Kawasan Barat dan Timur" yang dahulu tidak sebegitu jelas seperti sekarang. Banyak orang mengecam gejala-gejala sedemikian dan merasa simpati terhadap semua yang tertindas dan dianiaya atau yang atas dasar apapun sedikit banyak disingkirkan dan tidak dihiraukan kepentingan-kepentingannya. Namun demikian, kecaman, protes, dan rasa simpati itu ternyata tidak selalu tampak hasilnya. Apa yang dirasakan sebagai suatu kewajiban tidak dapat terlaksana. Kita merasa sebagai saudara tapi tak mampu mewujudkan persaudaraan antar-manusia dan antar-golongan. Memang tidak jarang terjadi dewasa ini bahwa orang atau suku yang satu memberikan pertolongan dan bantuan massal kepada suku atau orang lain yang tertimpa bencana. Tetapi, tidak kurang banyaknya yang memasang halangan terhadap perwujudan persaudaraan umum. Tidak jarang pertolongan dan bantuan yang diberikan tidak mencerminkan rasa persaudaraan sejati, melainkan rasa superioritas. Agak sering pula bantuan dan sokongan dialami sebagai penghinaan oleh mereka yang ditolong, sehingga tidak memupuk persaudaraan melainkan meruncingkan ketegangan dan pertentangan.

Tampaknya, masalah kita sekarang adalah tentang cara kita memperlakukan orang sebangsa: *apakah kita memperlakukan sesama sebagai saudara demi "bhinneka tunggal ika" ataukah sebagai sumber daya (walau diperhalus "SDM-anusia") untuk peningkatan kemakmuran kita (alias "demi keuntungan kita")?*

Tulisan ini bermaksud mengkaji pengalaman hidup bersama kelompok-kelompok dalam menjunjung tinggi cita-cita pendirian Republik Indonesia. Supaya kita dapat mengkaji secara tepat aneka upaya seputar hubungan antara kelompok-kelompok itu satu sama lain, perlulah kita menelaah terlebih dahulu beberapa pengertian dasarnya. Sesudah itu, barulah kita dapat berbicara mengenai aneka wujud kesatuan kita atau kerukunan antara kelompok di Indonesia. Kita juga ingin mencoba melihat, apakah iman kristiani dapat memberikan sumbangan. Karena masalah ini amat luas, kami ingin memusatkan perhatian pada masalah hubungan antar-umat yang beragama berlain-lainan.

## Panorama Situasi Indonesia

Indonesia sudah semakin terseret masuk ke dalam proses globalisasi yang menyangkut segala segi hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai proses, globalisasi terjadi tidak dalam waktu singkat,[1] dalam jangka lama pembangunan Indonesia menjadi bagian dari proses perkembangan global walaupun banyak ahli yang mengatakan bahwa perkembangan global itu terjadi dengan cara dan kecepatan yang bermacam-macam.[2]

Paling banyak uraian mengenai perkembangan global ini terdapat *pada segi ekonomi*.[3] Kalau tadi dikatakan bahwa perkembangan dunia bergerak secara berangsur-angsur, maka segi ekonominya semakin tumbuh selangkah-demi-selangkah. Kewirausahaan sejati akan semakin diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan segenap warga bangsa kita.[4]

Teknologi pangan semakin canggih tetapi dunia akan semakin dipenuhi manusia yang membutuhkan makanan. Kekurangan pekerjaan, kurang kesehatan dan gizi, serta kerusakan mental dan fisik masih akan tetap menggerogoti bangsa kita, walaupun justru ada sebagian kecil yang semakin makmur. Padahal, sumber daya alam semakin menipis. Perebutan makanan dan perdagangan semakin merisaukan orang.

---

1. *Bdk.* Kuznets, Simon, *Modern Economic Growth*, Yale University, New Haven, 1966.
2. *Lih.* mis. Brata, Ravi, *The Great Depression: Why it's got to happen – How to protect yourself*, Simon & Schuster, New York, 1965; Kahn, Herman, "World Economic Development and Productivity", dlm. *Asian Productivity Organization, Development Strategies for the 1980s,* APO, Tokyo.
3. *Lih.* Bergsten, C. Fred, "Economic Imbalances and World Politics", dlm. *Foreign Affairs,* Vol. 65, No. 4, 1987 (Spring); Drucker, Peter F., "The Changed World Economy", dlm. *Foreign Affairs,* Vol 65, No. 4, 1987 (Spring); Economic Planning Agency (EPA), Government of Japan, *Prospects for the Pacific Region to the Year 2000: Report Summary,* 1985; Rostow, W.W., *The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto*, The MIT Press, Cambridge, 1960; Scalapino, Robert A., "Asia's Future",dlm. *Foreign Affairs,* Vol. 65, No. 4, 1987; Sorman, Guy, "Time for a New Wealth of Nations", dlm. *The Asian Wall Street Journal*, 14 Desember 1987; Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun, "Indonesia Menghadapi Tantangan Perubahan Global Dasawarsa 1990-an", dlm. Deliar Noer & Alisjahbana Iskandar (ed.), *Perubahan, Pembaruan dan Kesadaran menghadapi Abad ke-21*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1988, 527-556; Wibisono, Christianto, "Ekonomi dan bisnis dalam abad ke-21", dlm. Deliar Noer, *ibid.*, 557-603.
4. *Bdk.* Raka, Gede, "*Kewirausahaan:* Sketsa pengembangan dan kemungkinan perkembangannya di Indonesia", dlm. Deliar Noer, *ibid.*, 313 dst.

Hutang negara dan inflasi bertambah besar. Frustrasi di tingkat nasional dan internasional semakin menguat. Kesenjangan kaya dan miskin semakin mencolok. Dalam situasi itu, orang Indonesia membutuhkan sarana-sarana hidup yang menyebabkan ia dapat hidup layak berdampingan dengan semua bangsa lain, namun kita tahu, betapa sulit menentukan batasan "hidup layak" itu.[5] Ada yang memakai tolok ukur konsumsi makanan,[6] namun cara ini menghasilkan pengukuran kelayakan hidup hanya dari sudut kebutuhan terendah secara mutlak. Hal itu sangat berkaitan dengan penghasilan, kesempatan kerja, dan kemudahan kerja yang sangat bervariasi.[7] Padahal, kerja dengan segala faktornya itu dipengaruhi oleh politik, kebudayaan, dan pandangan hidup serta lingkungan manusia.

Di pihak lain, proses globalisasi akan membawa manusia Indonesia berkontak dengan penduduk negara-negara lain yang mempunyai pola pendapatan berbeda. Kerjasama ekonomi baik internasional maupun regional dapat memainkan peranan besar dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat[8] Ada studi yang memperlihatkan bahwa pola pertumbuhan negara-negara itu berbeda-beda.[9] Perjumpaan itu bisa mengakibatkan bahwa kita menjadi frustrasi dan lalu membabi buta mengejar kemajuan materi tanpa *discernment* sama sekali.

Kesenjangan kaya-miskin mengacaukan proses mengejar cita-cita Negara Kesatuan (juga dalam segi kesejahteraaan ekonomis). Kesenjangan itu semakin tidak terkendali dalam perlombaan ekonomi liberal. Bila model pembangunan kita tidak diubah, ada bahaya besar bahwa ekonomi mendorong rakyat Indonesia untuk saling mengerkah bagaikan serigala.

---

5. *Bdk.* Hardjana, Andre, "Konsep Hidup Layak dalam Pandangan Masyarakat Indonesia: Sebuah Pendekatan Sosiologis" dlm. *Atma nan Jaya*, Tahun I, No. 2, Desember 1988, 15-28.
6. *Bdk.* Sayogyo, "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan", dlm. *Kompas*, 17 November 1977.
7. *Bdk.* Arndt, H.W. dan Sundrum,R.M., "Employment, Unemployment and Underemployment", dlm. *BIES*, XVI, 3 (November 1980), 61-82.
8. *Bdk.* Simandjuntak, Djisman S., "Kerjasama ekonomi Asean: pencarian terobosan baru", dlm. *Jurnal Ilmu Politik*, 2, 1987, 74 dst.
9. *Lih.* Hendro, R., "Model Pertumbuhan di Negara-negara berpendapatan rendah dan sedang", dlm. *Atma nan Jaya*, Th. I, no. 2, Desember 1988, 103 dst.

Rekayasa ekonomi membawa banyak ketegangan di bidang non-ekonomis. Dalam situasi itu, politik wajib untuk menolong hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar setia pada cita-cita Pembukaan UUD 1945, sebagai kesepakatan awal berdirinya negara ini, yaitu *membangun bangsa sebagai kesatuan.* Rekayasa politik itu akan mempengaruhi perkembangan kesejahteraan daerah-daerah dan rakyatnya.[10] Perbedaan kecepatan berkembang menjadi faktor penting yang memerlukan penanganan cermat sebab bisa mengancam persatuan. Padahal, kesenjangan kecepatan antar-daerah terdapat di mana-mana, juga secara global.[11] Sementara di London dan Jakarta banyak anak sudah sibuk dengan komputer, tidak sedikit anak di pedalaman Kalimantan dan Irian sedang mulai belajar mempergunakan pensil dan batu baterai.[12]

Di pihak lain, perkembangan juga dapat membantu bangsa ini untuk mengatasi ikatan-ikatan primordial (suku, agama, ras, dan golongan) sedemikian sehingga persatuan dapat lebih mudah diupayakan. Pengelompokan politik dapat disusun tidak berdasarkan argumen emosional melainkan berlandaskan argumen rasional. Justru karena pembangunan akan bisa membawa kita pada aneka kesenjangan sosial, kita membutuhkan solidaritas nasional yang lebih kokoh lagi.[13]

Namun juga dalam hal itu, pembangunan sistem politik yang jitu, menjadi tuntutan, sebab kesepakatan seluruh warga negara untuk ikut mendukung pembangunan tidak dengan sendirinya menjadikan mereka pendukung suatu pandangan atau kelompok politik tertentu.[14] Pada masa ini, seharusnya Indonesia sudah memiliki "kemampuan untuk mencegah lahir dan berkembangnya berbagai macam krisis yang dapat merusak atau membahayakan eksistensi hidupnya." Dalam upaya itu sangat pentinglah konsolidasi ideologi dan kebudayaan berpolitik, pe-

---

10. *Bdk.* Riwukaho, Josef, "Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pungutan retribusi daerah", *Jurnal Ilmu Politik,* 2, 1987, 37dst.
11. *Bdk.* Alvin Toffler, *The Future Shock,* Pan Books, London, 1970, 13.
12. Irwanto, "Tantangan Integrasi Nasional di Tahun 2000", *Atma nan Jaya,* Th. I, No. 1, 3.
13. Schoorl, J.W., *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Gramedia, Jakarta, 1984, 2.
14. Soedjatmoko, "Pembangunan sebagai Proses Belajar", dlm. *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000: Sebuah Bunga Rampai*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986, 21.

nguatan struktur dan kelembagaan politik, perangsangan partisipasi dan komunikasi politik.[15] Diperlukan sekali adanya pranata kenegaraan yang bisa melayani proses berjalannya demokrasi.[16] Birokrasi akan dibutuhkan untuk mengabdi negara.[17]

Dalam kondisi semacam itu Indonesia akan ditantang untuk lebih siap berperan dalam percaturan politik regional dan internasional. Situasi global akan semakin mempengaruhi politik dalam negeri dan kondisi politik dalam negeri akan menentukan efektivitas peran kita di dunia.[18] Kita sudah merasakan bahwa perbaikan hubungan Amerika Serikat dan Rusia mempengaruhi cara bertindak kita di dunia internasional karena Eropa dan daerah Asia Pasifik akan semakin berperan. Sementara itu, krisis Timur Tengah senantiasa menempatkan kita dalam pilihan-pilihan yang sulit untuk berperan dalam hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral. Saling mempengaruhi antara Indonesia dan dunia juga akan mencakup ketegangan yang dialami oleh lembaga-lembaga demokrasi untuk memenuhi tugas pelayanannya bagi rakyat.[19]

Kemajuan ekonomi dan kesadaran politik belum dengan sendirinya akan meningkatkan mutu *kebudayaan* orang. Datangnya pembangunan di Kalimantan atau Irian malah dapat mengacaukan tata budaya setempat yang harus diolah kembali dalam menghadapi peradaban baru.[20] Ajaran politis yang akhir-akhir ini sangat menekankan sekali "keselarasan" sebagaimana biasa dipaparkan dalam kursus P4 sudah perlu

---

15. Alfian, "Pembangunan Politik setelah Terciptanya Kerangka Landasan Pembangunan Nasional", dlm., *Jurnal Ilmu Politik*, 1, 1986, 38.
16. *Bdk.* Ndraha, Taliziduhu, " Birokrasi dan Pembangunan: Dominasi atau Alat Demokratisasi? Suatu Telaah Pendahuluan", dlm. *Jurnal Ilmu Politik*, 1, 1986, 48 dst.
17. *Bdk.* Kaisiepo, Manuel, "Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara: Birokrasi dan Politik di Indonesia Era Orde Baru", dlm. *Jurnal Ilmu Politik*, 2, 1986, 33.
18. *Lih.* Sudarsono. Juwono , "Politik Internasional menjelang Tahun 2000", dlm. *Deliar Noer*, 605 dst. *Bdk.* Mauna, Bur, "Indonesia dan Perkembangan di Kawasan Pasifik Baratdaya", dlm. *Jurnal Ilmu Politik* 4, 1989, 31-52.
19. Shane, Harold G. dan Tabler, M. Bernardine, *Educating for a New Millenium: Views of 132 International Scholars*, Bloomington, Indiana: A Diamond Jubilee Publication of the Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1981.
20. *Bdk.* Coomans, Michael, *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*: Gramedia, Jakarta, 1987, 172-173. Juga *bdk.* Boelaars, Jan , *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*, Gramedia, Jakarta, 1986, 175-176.

dikaji kembali sebab baik pertumbuhan ekonomi (yang dapat semakin menciptakan jurang dan konflik) maupun perkembangan kesadaran dan kecerdasan manusia Indonesia (yang dapat semakin memberi peluang kepada perbedaan pendapat) mengajak kita menafsirkan kembali gagasan keserasian dan peranan konflik yang konstruktif justru bagi kebersamaan dan persatuan.[21] Mungkin sekali kebudayaan kita bersama akan terbukti harus direkayasa sehingga mengalami perkembangan bentuk, juga seputar kebersamaan dan perbedaan.[22]

Pandangan "bhinneka tunggal ika" akan ditantang pada abad 21 karena kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia akan semakin kompleks.[23] Pengaturan hubungan sekarang lebih banyak melalui aneka organisasi, kelak akan ditentukan lebih oleh teknologi komunikasi.

Pada abad 21 gerak Indonesia yang bersatu hanya mungkin terlaksana, kalau komunikasi komprehensif lintas budaya bisa diupayakan secara optimal.[24] Interaksi yang sungguh bisa menyuburkan pembentukan keindonesiaan dan menjadi kancah pendidikan manusia Indonesia tidak hanya membutuhkan komunikasi lintas budaya geografis melainkan juga mental dan kerohanian pula. Kebudayaan yang perlu menjadi tatapan usaha pendidikan adalah kebudayaan yang dimediasikan oleh komunikasi massa, maka pendidikan perlu mencakup pendidikan media: tidak hanya untuk membantu agar orang bisa memanfaatkan informasi media tetapi juga agar orang bisa memakai media itu untuk perkembangan kepribadiannya dan demi persatuan Indonesia.[25]

Globalisasi di bidang kebudayaan akan memungkinkan kebudayaan nasional kita mendapat peluang untuk berkembang tetapi juga dihadapkan pada tantangan untuk menjernihkan diri serta memurnikan

---

21. *Bdk.* Umar Kayam, "Keselarasan, dan Kebersamaan: Suatu Penjelajahan Awal." dlm. *Prisma*, no. 3, th. XVI, Maret 1987, 32 dst.

22. *Bdk.* Lubis, Mochtar, *Transformasi Budaya untuk Masa Depan*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985.

23. Hardjana, Andre, "Komunikasi Lintas Budaya di Indonesia: Masa Kini dan Masa Depan", dlm., *Atma nan Jaya*, Th. I, no. 1, 1988, 136. *Bdk.* juga dengan Tebba, Sudirman, "Islam di Indonesia: Dari Minoritas Politik menuju Mayoritas Budaya", dlm. *Jurnal Ilmu Politik*, 4, 1989, 53-65.

24. *Bdk.* Hardjana, Andre, *op. cit.*, 146.

25. *Bdk.* Michael R. Real, *Mass Mediated Culture*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1977.

relasi-relasi budaya yang mungkin terpaksa harus dijalin karena kepentingan ekonomi dan politik. Rekayasa kebudayaan perlu secara sadar sekali mengambil sikap tegas terhadap kecondongan-kecondongan para ekonom dan politisi untuk mengadakan atau memutuskan hubungan atas dasar pertimbangan dangkal di bidang ekonomi dan politik.

Di balik panorama ekonomi, politik, dan kebudayaan tersimpan "pandangan hidup manusia". Pembangunan Indonesia pada abad 21 akan tetap berdasar pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa kita, tetapi tetap akan memberi kita ruang untuk membarui cara kita memandang dunia, sesama, dan diri sendiri. Kebersamaan kita sebagai bangsa bertitik berat pada usaha pemenuhan kebutuhan hidup.[26] Pandangan hidup itu akan harus bisa meningkatkan harga diri manusia Indonesia di tengah perjumpaan budaya.[27]

Kejutan budaya yang dialami oleh suku-suku asli di Kalimantan dan Irian hanyalah merupakan cermin dari kejutan budaya yang sebenarnya dialami oleh banyak saudara kita sebangsa dalam proses pembangunan ini. Padahal, kejutan budaya itu tidak tinggal pada kulit manusia melainkan menembus adat dan berkenaan dengan kepribadian manusia. Maka kejutan budaya itu juga menyentuh sikap moral. Belum tentu semua orang mengalami depresi moral seperti yang dilaporkan mengenai suku di Irian, tetapi ketidakseimbangan moral jelas bisa menjadi akibat tabrakan budaya dalam proses pembangunan.[28]

Lebih jauh, kita perlu ingat bahwa ekonomi dan politik adalah bagian hidup manusia yang harus kita cari makna kemanusiaannya. Dengan begitu dapatlah ditemukan sikap tepat antara memandang ekonomi dan politik sebagai satu-satunya yang penting dan memandang keduanya itu sebagai kancah kejahatan.[29]

Namun di sini kita berjumpa dengan tantangan abad 21 bahwa milenium itu akan dipenuhi dengan aneka sistem nilai dan ideologi. Sistem-sistem nilai itu bersaingan baik di negara kita maupun di seluruh dunia. Semua suku dan setiap orang ditantang untuk memilah-milah

---

26. Bachtiar, H.W., "Masalah Integrasi Nasional di Indonesia", dlm. *Prisma*, no. 8, Th V, Agustus 1979.

27. Moeljarto, "Alternatif Perencanaan Sosial-Budaya", dlm., *Masalah sosial Budaya Tahun 2000: Sebuah Bunga Rampai*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986.

28. Boelaars, *op. cit.*, 175-176.

29. *Bdk.* Wibisono, Christianto, "Ekonomi dan Bisnis dalam Abad 21", dlm., *Deliar Noer, op. cit.*, 595.

dengan cermat *(discernment)* manakah yang akan dipilih bagi hidupnya sendiri maupun bagi bangsanya.[30] Akibat yang sekarang terasa adalah semakin banyaknya perbedaan pendapat. Karena kita terlalu sering tidak diberi kesempatan untuk berbeda pendapat secara real, persatuan menjadi rawan.

Sebagai kesimpulan sementara, dapatlah kita katakan bahwa masalah paling mendasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini adalah: *apakah kita memperlakukan sesama kita sebangsa sebagai alat untuk mencapai kepentingan kita dan golongan kita sendiri ataukah sebagai saudara yang sama-sama mau menggapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan?* Tidak mudah untuk mengatakan, siapa yang paling bertanggung jawab dalam masalah itu. Kita semua bertanggung jawab. Kita wajib saling membantu untuk bersama mengatasi masalah itu.

Jawab atas masalah itu dapat terjadi dalam setiap lingkup hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara namun kita yakin bahwa *masalahnya yang terdalam terletak pada rapuhnya hubungan antara kita-kita yang beragama beraneka.* Kerawanan di situ kerap kali menjadi dasar dari banyak masalah lain.

## Telaah Masalah

### *1. Dasar-dasar Pemikiran*

Pembicaraan mengenai hubungan antarkelompok dan antara kelompok-kelompok dengan pemerintah dalam catatan ini dipahami dalam konteks Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pegangan pertamanya adalah dokumen-dokumen Republik Indonesia. Lalu perlu dilihat, sejauh mana dokumen-dokumen itu berdiri di jalan yang sama dengan pandangan dokumen-dokumen agama.

Para pendiri Republik Indonesia telah bersepakat untuk membangun masa depan bangsa dalam negara kesatuan yang tidak berdasarkan ideologi apa pun selain Pancasila.[31] Sudah pada awal kelahiran Republik kita, Abdul Kahar Muzakkir dengan dukungan Hadikusumo menegaskan bahwa "... negara ini tidak berdiri di atas agama..."[32] Dalam

---

30. *Bdk.* Shane Harold G., dan Tabler, M. Bernardine, *op. cit.*

31. *Bdk.* Sambutan Presiden pada Peringatan Nuzulul Qur'an tanggal 11 September 1976 di Istana Negara.

32. Yamin, Muh., *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jilid I, hlm. 386.

Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945, sewaktu membicarakan Pembukaan UUD 1945, Moh. Hatta menegaskan rumusan baru tentang "...Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".[33] Soepomo secara sangat eksplisit menyebutkan hal itu dalam pidatonya 31 Mei 1945, "... dalam negeri nasional yang bersatu itu, urusan agama akan terpisah dari urusan negara dan dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Dan dengan sendirinya dalam negara sedemikian seseorang akan merdeka memeluk agama yang disukainya. Baik golongan agama yang terbesar, maupun golongan yang terkecil tentu akan merasa bersatu dengan negara."[34]

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan dengan jelas bagaimana sejak awal kelahiran Republik Indonesia sudah ada kesadaran, bahwa negara ini tidak mau mendasarkan dirinya pada suatu ajaran agama, melainkan pada pegangan bersama, yaitu Pancasila. Agama dihayati oleh orang per orang dalam negara ini dan memberi motivasi terdalam bagi keterlibatannya dalam negara, tetapi tidak secara eksplisit dipergunakan sebagai pertimbangan yang menentukan langkah kenegaraan. Pancasila-lah yang diakui sebagai wahana pemersatu. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan kenegaraan kita sekarang perlu mengikuti semangat yang sama: *memakai pegangan Pancasila, bukan pegangan agama tertentu.* Hal itu akan mempersatukan bangsa kita.

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 menyatakan keyakinan yang jelas bahwa kita mau bersama-sama membangun negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat *dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa*. Hal itu diulang lagi dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1. Dalam Penjelasan UUD 1945, Umum II, 4, dikatakan bahwa penyelenggara negara berkewajiban memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Penjelasan UUD 1945 ad Bab XI, Pasal 29, ayat 1 juga menekankan hal serupa.

---

33. *Ibid.*, hlm. 400-402.
34. *Ibid.*, hlm. 117.

Dari nas-nas itu dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia *menjamin kebebasan agama dan kebebasan beragama*. Negara Indonesia tidak melandasi langkah kenegaraannya pada hukum suatu agama namun *tidak bersikap masa-bodoh, melainkan bersikap positif, terhadap agama*. Sikap itulah yang menjamin persatuan kita dalam kebhinnekaan agama.

Tap MPR No. II/MPR/1978, II menegaskan keyakinan bersama para wakil rakyat bahwa "kebahagiaan hidup akan tercapai apabila seluruh usaha bernegara didasarkan pada keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah". Pendirian itu menunjukkan bahwa kita menjunjung tinggi sikap bertuhan tanpa memakai hukum agama sebagai pertimbangan langsung untuk mengambil keputusan kenegaraan dalam masyarakat majemuk ini. Persatuan yang dihasilkannya akan melampaui formalisme.

Dalam Tap MPR No. II/MPR/1978, Naskah P4, II, 1, diterangkan lebih lanjut bagaimana kita semua "sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang dipercayainya". Prinsip itu memberikan kepada kita semua kebebasan agama dan kebebasan beragama. Jelas bahwa agama ditempatkan dalam kerangka sikap pribadi manusia Indonesia dan bukan pada sistem politik. Begitulah pegangan dari sudut badan legislatif.

Dari sudut *politik praktis,* UU No. 8/1985 mengenai keormasan menunjukkan dengan jelas bahwa negara kita tidak memperlakukan lembaga-lembaga agama sebagai lembaga politik. Oleh sebab itu, negara memang amat menghargai agama sebagai lembaga dan tidak berniat mengaturnya sejauh menjadi lembaga agama. Oleh karena itu, lembaga-lembaga agama juga tidak seyogianya bertindak sebagai lembaga politik.

Sikap yang sangat berprinsip itu ditampakkan juga dalam GBHN 1988 serta 1993 secara lebih terinci. Di sana dikatakan bahwa negara mau melayani agar kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang demi persatuan seluruh rakyat. Lebih lanjut, GBHN 1993 mengharapkan agar agama membantu supaya rakyat hidup seimbang di tengah perkembangan pembangunan yang bisa saja menyebabkan orang terombang-ambing antara keberimanan dengan sekularisme yang mendewa-dewakan segala yang duniawi sampai melupakan yang ilahi.

Di sini kelihatan bahwa badan legislatif kita memberi ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai tempat agama dalam negara: di satu pihak dengan hormat, di pihak lain dengan tanpa menjadikan negara kita negara agama yang keputusan-keputusannya ditentukan secara eksplisit atas dasar hukum suatu agama negara. Hanya dengan cara itu kesatuan kita sebagai *bhinneka tunggal ika* dapat terpelihara. Dari pihak eksekutif, dalam hal ini Presiden Soeharto, kita dengar pernyataan yang sama jelasnya.

Dalam sambutannya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 29 Januari 1980 di Istana Negara, Presiden Soeharto menunjukkan peranan agama dalam pembangunan "untuk memelihara keseimbangan, keserasian, dan keselarasan kemajuan dalam bidang fisik-kebendaan dan bidang mental-kerohanian". Oleh karena itu, dikatakannya bahwa "Pemerintah sangat berkepentingan dengan pembangunan kehidupan agama. Tetapi, ini tidak berarti bahwa Pemerintah akan mencampuri masalah-masalah intern keagamaan, baik yang menyangkut keyakinan, pemahaman, maupun ajaran-ajaran agama itu. Dalam hal ini Pemerintah *hanya ingin memberikan pelayanan dan bantuan agar supaya pelaksanaan ibadah pemeluk-pemeluknya dapat terjamin dengan aman dan tenteram*" sebab "kegiatan keagamaan itu pada dasarnya adalah kegiatan umat beragama sendiri".

Pidato Presiden Soeharto pada pembukaan Sidang Raya IX Dewan Gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 19 Juli 1980 juga menegaskan bahwa "kewajiban pemerintah ... bertanggungjawab agar dalam negara persatuan dan negara kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila ini dapat kita jaga keutuhan, kerukunan, dan keserasian hidup antara semua pemeluk-pemeluk agama yang berlain-lainan di Tanah Air."

Arah yang sama ditunjukkan dalam sambutan Presiden pada upacara pembukaan Rapat Kerja Departemen Agama pada tanggal 25 Mei 1981 di Jakarta yang mengatakan bahwa "negara tidak mengatur dan tidak ingin mencampuri urusan syariah dan ibadah-ibadah agama, yang umumnya terbentuk dalam aliran agama masing-masing. Syariah dan pelaksanaan ibadah masing-masing orang menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa pada dasarnya adalah hak setiap orang menurut keyakinannya masing-masing, yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Biarlah mereka melaksanakan menurut keyakinan dan kepercayaannya, di bawah bimbingan para ulama dan pemuka-pemuka agama yang ahli dan berwibawa dalam bidangnya. Ini adalah sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD kita ..."

Selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa "selaku Pemerintah, *Departemen Agama berkewajiban melayani hajat keagamaan seluruh warga negara, apa pun agama yang dipeluknya.*" Pemerintah sama sekali tidak perlu mencampuri segi-segi keyakinan seseorang atau kelompok mengenai agama yang dipeluknya. Beliau melanjutkan, "Tolok ukur pembangunan kehidupan agama jelas bukan semata-mata hal-hal yang bersifat kebendaan. Karena itu, (pemerintah) jangan sampai hanya terpaku pada sarana-sarana yang bersifat kebendaan semata-mata dalam kehidupan beragama. Sebab yang menjadi sasaran dalam pembangunan kehidupan beragama bukanlah segi-segi kuantitas melainkan segi kualitas kehidupan bangsa kita, segi-segi mental, moral, dan spiritual masyarakat kita. Dan dalam kerangka negara dan masyarakat Pancasila, maka sasaran utama pembangunan kehidupan agama adalah makin membudayanya nilai-nilai agama, makin mantapnya kerukunan hidup antara umat berbagai agama, dan makin kokohnya ideologi nasional kita, Pancasila. Semua ini tidak boleh dipisah-pisahkan".

Dalam kaitan itu Presiden Soeharto pada tanggal 1 Maret 1988 menyebutkan bahwa bentuk pelayanan negara ialah "mengembangkan kehidupan bermasyarakat yang penuh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sesuai dengan Pancasila". Lebih lanjut dikatakannya bahwa "peranan agama adalah sebagai pembentuk hati nurani untuk meningkatkan martabat pribadi-pribadi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Agama-agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi dorongan dan motivasi moral dalam gerak pembangunan masyarakat kita".

Presiden Soeharto dalam Peringatan Natal Bersama Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 1989 di Balai Sidang Jakarta masih menegaskan lagi bahwa "dalam negara yang berdasarkan Pancasila ini kita memberi makna hidup keagamaan kita secara sangat mendalam. Melalui penghayatan kita atas P4, kita menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu kebebasan manusia yang paling asasi, bukan pemberian negara dan bukan pula pemberian golongan. Kita saling menghormati keimanan kita masing-masing".

Singkat kata, negara kita sangat menghargai agama tetapi tidak mau melandaskan kebijakan-kebijakan kenegaraannya pada hukum agama tertentu. Maka segala sesuatu, termasuk hubungan anggota agama suatu jemaat dengan jemaat lain sebagai rakyat negara ini, diatur dengan hukum yang sama, yaitu hukum negara yang berlaku sama bagi semua warga negara. Walaupun berbeda dari sudut agama, namun kita bertekad untuk membangun Negara Kesatuan ini atas dasar Pancasila.

## 2. *Sikap Gereja*

Sudah lama sekali Gereja Katolik berurusan dengan masalah ini namun, demi ringkasnya, kita hanya akan memperhatikan Gereja Katolik 35 tahun terakhir saja. Gereja memperhatikan sekali baik keguyuban warga Gereja satu sama lain maupun kerukunan warga Gereja dengan anggota jemaat lain (baik yang seiman kristiani maupun yang beragama Islam, Yahudi, Hindu, Budha serta lain-lainnya). Gereja Katolik bahkan membarui sikapnya kepada orang-orang yang tak-bertuhan.

Para pemimpin Gereja yang hadir dalam Konsili Vatikan II sangat memikirkan bagaimanakah *kerukunan dalam Gereja sendiri* dapat diusahakan; bagaimanakah *kerukunan dengan orang-orang yang beragama lain* dapat diupayakan; bagaimanakah *Gereja dapat berbimbingan tangan dengan para negarawan* untuk bersama-sama mengejar kesejahteraan umat manusia.

1) Kerukunan antarwarga Gereja sendiri diusahakan dengan memperbaiki *tata hubungan dalam* Gereja. Dekrit mengenai para uskup"[35] dan mengenai para imam[36], di samping mengolah kembali prinsip-prinsip dasar kedudukan uskup dan imam serta cara hidup mereka, juga meninjau kembali cara mereka berhubungan satu sama lain dengan rukun[37]. Hubungan antara uskup satu dengan lainnya dalam suatu negara ditata kembali sehingga didirikan Konferensi para Uskup[38], yang tetap menghargai kemandirian setiap keuskupan. Kerjasama antara imam satu dengan lainnya, baik di bidang pribadi maupun dalam hal karya, mendapat perhatian besar.[39] Namun demikian, itu semua tidak akan berjalan apabila tidak ada pembaruan *cara orang memandang jemaat.* Menurut pandangan Konsili Vatikan II, jemaat adalah partner utama dalam komunikasi Allah dengan manusia,[40] maka orang hanya dapat beriman dengan otentik apabila memelihara kerukunan dengan sesa-

35. Dekrit *Christus Dominus*, disingkat CD.

36. Dekrit *Presbyterorum Ordinis*, disingkat PO.

37. *Lih.* CD 3,4,5,6 dan PO 7,8.

38. *Lih.* CD 38.

39. *Lih.* PO 8.

40. *Lih.* seluruh Konstitusi Dogmatis mengenai Gereja (*Lumen Gentium*, disingkat LG) Bab II.

ma. Oleh sebab itu, para pemimpin jemaat berperan *membantu* warga jemaat dalam kontak satu sama lain supaya bisa kontak dengan Tuhan.[41] Dengan demikian, fungsi utama pemimpin jemaat adalah *mempersatukan*, membangun persatuan.

2) Sidang Semesta Waligereja Sedunia (Konsili) Vatikan II sangat memperhatikan bagaimana caranya agar iman kristiani mewujud di dalam masyarakat. Hal itu mempengaruhi cara Gereja memandang kerukunan dengan umat agama lain dan cara warga Gereja berbakti kepada negara.

   Bagi umat katolik, Gereja adalah sarana untuk memuliakan Allah dan dengan begitu menyelamatkan manusia. Pemeran utama dalam proses itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Gereja mengakui bahwa Allah berkarya di "luar Gereja". LG artikel 8 berani menyatakan bahwa "di luar Gereja dapat ada kebenaran". Dengan pegangan itu, dialog dengan warga agama lain adalah *tindakan fundamental* bagi umat katolik. Kerukunan dari sudut pandangan katolik senantiasa berarti kerukunan baik dengan warga sendiri maupun dengan orang-orang warga agama lain.

3) Dengan latar belakang pandangan Konsili Vatikan II itu, dalam Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia (1970) dikatakan bahwa Sila Perikemanusiaan menjadi tempat paling baik bertemunya aneka agama di Indonesia (no. 45). Dalam rangka itu pemerintah bertugas untuk menyusun tertib umum masyarakat yang memungkinkan keyakinan seseorang di bidang agama terlaksana secara leluasa (no. 46). Untuk mengatasi kericuhan di antara para pemeluk aneka agama, diperlukan bahwa semua orang Indonesia bersedia *bergaul tulus* dengan pemeluk agama lain, para pemimpin agama mau membimbing umatnya agar bertoleransi tinggi, para pemimpin negara mengakui bahwa tegangan-tegangan sosial kerap kali bukan karena perbedaan agama melainkan karena perubahan sosial kemasyarakatan umum, yang antara lain merupakan konsekuensi biasa dari derap pembangunan. Selain itu, *kericuhan bisa ditanggulangi kalau pranata dan perangkat hidup kenegaraan mempergunakan prinsip hidup yang sama bagi semua warga negara.* Dengan begitu, kemungkinan tabrakan karena perbedaan paham keagamaan dapat diminimalisasikan sehingga persatuan dan kesatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat diusahakan secara

41. *Bdk.* PO 2 dan 3.

optimal. Melalui pranata-pranata itulah semua warga, entah dari agama manapun, diberi pengayoman yang sama atas dasar kewarganegaraannya. Dengan bantuan tatanan dan iklim seperti itu, dapatlah dirangsang peranserta semua pihak dengan menjalankan subsidiaritas usaha secara optimal (KH 75). Setiap masalah yang dapat diselesaikan oleh masing-masing lembaga agama atau oleh lembaga agama yang satu dengan lainnya biarlah diselesaikan antarmereka. Lebih jauh, negara perlu menciptakan suasana agar lembaga-lembaga agama semakin mengurus masalahnya sendiri-sendiri dan negara memusatkan perhatian pada usaha-usaha yang menyangkut seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

4) Pranata hidup, yang sejauh mungkin menghindari kemungkinan salah tafsir dengan jalan sebanyak mungkin memakai prinsip-prinsip kenegaraan yang sama bagi semua warga ini, semakin penting bila kita mengingat luas dan beranekanya bagian-bagian negara kita. Sangat mudah terjadi bahwa aturan yang mendua dan yang tidak jelas diktum serta tafsirnya menimbulkan perbedaan penerapan dan, karena itu juga, perselisihan paham di daerah-daerah terpencil. Seruan itu dinyatakan dalam Kesepakatan Bersama PNUKI 1984 (no. 37). *"Komunikasi antara pengabdi masyarakat sangat diperlancar kalau hukum disusun dengan dasar yang sama bagi semua warga negara yaitu bertumpu pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti persaudaraan, kesamaan martabat, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama"* (PNUKI 1984, 38).

## Prinsip-prinsip yang Dapat Kita Pegang Bersama

Hubungan antara agama dengan pemerintah dalam negara kita dapat dijalin dengan baik apabila kita memperhatikan beberapa hal yang muncul dari tinjauan kita atas dokumen-dokumen Indonesia dan dokumen Gereja Katolik.

1. Agama sebagai tanda persatuan Allah dengan manusia hanya dapat hidup kalau secara terus menerus dan terorganisasikan mengusahakan persatuan. Kerukunan intern bukan hanya bisa diusahakan atau secara strategis harus diupayakan, melainkan merupakan bagian dari keberadaan Gereja sendiri.
2. Karena mengakui kemahaagungan Allah, umat katolik terbuka pada karya Allah di luar dirinya. Oleh sebab itu, umat katolik secara hakiki membangun kontak dengan warga agama lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok.

3. Negara maupun agama melayani rakyat yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan umum di wilayah yang secara bersama didiami oleh pemeluk aneka agama. Oleh karena itu, tolok ukur utama dari kerjasama itu adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi keagamaan.
4. Keabsahan pelayanan agama berdasar pada pengutusan ilahi sedangkan keabsahan pelayanan negara bertumpu pada kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, walaupun keduanya dapat saling membantu dalam melayani kesejahteraan rakyat, mereka bergerak pada taraf yang berlainan dan dengan jenis keabsahan yang berbeda. Negara melayani pada taraf kesejahteraan duniawi (tidak sama dengan kesejahteraan yang melulu materi) sedangkan agama melayani pada taraf kerohanian (yang tidak bisa terlaksana tanpa perwujudan duniawinya). Yang berbeda bukan *obiectum materiale*-nya melainkan *obiectum formale*-nya. Keabsahan tindakan kenegaraan tidak usah menunggu *fiat* dari agama dan keabsahan tindakan agama tidak pula tergantung dari *fiat* negara, sejauh masing-masing bertindak pada lingkup kewenangannya sendiri.
5. Dalam kewenangannya sendiri-sendiri, baik agama maupun negara memiliki otonomi. Akan tetapi, dalam pelayanannya kepada rakyat yang sama itu, agama dan negara perlu mencari kemungkinan kerjasama, tanpa melampaui batas kewenangan masing-masing. Otonomi negara dan agama itu tidak berarti lepas dari Tuhan. Itulah yang mau digarisbawahi oleh Pancasila. Orang Indonesia mau melacak kehendak Tuhan melalui penyelenggaraan ekonomi, hidup sosial kemasyarakatan, politik, keamanan, iptek. Pelacakan kehendak Tuhan dibantu khusus oleh agama sedang penyelenggaraan ekonomi dan sebagainya ditolong khusus oleh negara.
6. Cara penanganan kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga keagamaan adalah cara penanganan yang memakai dasar sama dan memberi pelayanan sama bagi semua warga negara. Semua tatanan dan pranata serta pengabdi masyarakat dari pihak negara bekerja selaku dan sejauh mengabdi semua warga negara. Oleh karena itu, perekayasaan kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga keagamaan senantiasa memakai warna kebangsaan dan bukan warna keagamaan. Segala tindak kenegaraan juga mesti memakai warna kebangsaan, bukannya warna keagamaan. Hanya dengan begitu kita konsisten dengan pengarahan Pembukaan UUD 1945.

7. Di hadapan UUD 1945, kita mengakui adanya lembaga negara dan agama sebagai dua lembaga yang terbedakan, walau tidak sepenuhnya lepas satu dari yang lain. Negara kita tidak mengabaikan agama tetapi tidak menjadi negara agama; menghormati agama tetapi tidak menjadikan agama sebagai lembaga politik. UU Keormasan menjadi pegangan berharga dalam hal ini: negara tidak memperlakukan agama sebagai lembaga politik dan agama juga jangan bertingkahlaku sebagai lembaga politik. Atas dasar ini, segala tindak kenegaraan dan perangkat kenegaraan, sejauh bersifat kenegaraan, hanya konsisten kalau juga tidak berwarna agama atau berdasarkan hukum agama mana pun.

**Wasanakata**

Problematika hubungan agama dan negara sebenarnya dapat dirumuskan sebagai permasalahan mengenai bagaimana *kita yang memeluk aneka iman dapat bersama-sama menyelaraskan penghayatan nilai-nilai transenden-ilahi dengan nilai-nilai imanen-manusiawi.* Dari sudut kenegaraan permasalahannya adalah bagaimana kita yang berbeda agama dapat bersama-sama *membangun dunia seraya memuliakan Tuhan.* Dalam masalah ini tersembunyi dasar dari banyak sekali perselisihan akhir-akhir ini. Integrasi bangsa kita dibahayakan oleh kesenjangan ekonomi, keruwetan politik, kerancuan budaya yang kesemuanya itu bertumpu pada relasi kurang rukun antara pemeluk agama yang satu dan yang lain.

Duduk perkaranya bagi kita sebagai warganegara perlu dicari tidak pertama-tama dalam pegangan keagamaan melainkan pada pendirian kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen kenegaraan dan dengan prinsip-prinsip ideologi negara, yaitu Pancasila.

Hal itu tidak berarti bahwa argumen keagamaan disingkirkan. Gereja Katolik ikut memperjuangkan integrasi nasional dengan mengintegrasikan ke dalam hidup umatnya: pendirian-pendirian nasional sebagai bahan dan kancah pembentukan Gereja Indonesia yang sungguh universal dan setempat. Sebaliknya, Gereja dapat pula belajar dari perjuangan integrasi nasional, bagaimana paguyuban Gerejawi lebih berpadu.